

# Pengaruh Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi Di BUMN

Luh Wulan Permatasari<sup>1\*</sup>, Poppy Sofia Koeswoyo<sup>2</sup>, Cahya Irawady<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Padjadjaran Bandung

<sup>1</sup>[wulanp611@gmail.com](mailto:wulanp611@gmail.com), <sup>2</sup>[poppysofia\\_ppa@yahoo.com](mailto:poppysofia_ppa@yahoo.com), <sup>3</sup>[cahya.irawady@gmail.com](mailto:cahya.irawady@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 19 Januari 2023

Disetujui : 30 Januari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT

*This study aims at examining the effect of quality of internal auditors and the effectiveness of audit committees on corruption in State-Owned Enterprises (SOE). The quality of the internal auditors is proxied by the competence (experience, certification, training) and objectivity of the internal auditors. Meanwhile, the audit committee is proxied by size, independence, number of meetings, and expertise of the audit committee. The research method used is a quantitative method with the type of hypothesis testing research. The population of this study were state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016 - 2020. Sampling used purposive sampling and obtained a sample of 20 companies with a total of 100 observations over 5 years. This study uses secondary data obtained from the company's annual report. The internal auditor objectivity and audit committee independence were excluded from hypothesis testing, because they have constant values during the year of observation. Simultaneously the quality of internal auditors (experience, certification, training) and audit committee effectiveness (size, number of meetings, expertise) have a significant negative effect on corruption. Meanwhile, partially only the experience of internal auditors has a negative effect on corruption. Internal auditor certification, internal auditor training, audit committee size, number of audit committee meetings, and audit committee expertise have no effect on corruption.*

**Keywords:** *Audit committee effectiveness, Corruption, Quality of Internal Auditors, State-owned Enterprises.*

## PENDAHULUAN

Korupsi mengacu pada praktik *fraud* yang menyalahgunakan posisi kepercayaan atau otoritas seseorang untuk melanggar hukum demi keuntungan pribadi seseorang (ACFE, 2016). *Transparency International* (TI) merupakan sebuah organisasi non-Pemerintah tingkat global. Setiap tahun, *Transparency International* merilis hasil survei persepsi publik terhadap korupsi dalam bentuk *Corruption Perceptions Index* (CPI) (*Transparency International*, 2021). CPI Indonesia turun tiga poin menjadi 37 pada tahun 2020, menempatkannya di urutan ke-102 dari 180 negara. Penurunan yang mengkhawatirkan ini terjadi seiring meningkatnya reputasi korupsi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 (*Transparency International* Indonesia, 2021).

Kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Erick Thohir, Menteri BUMN, mengaku "kaget" mengetahui banyak anggota partainya yang terjerat skandal korupsi. Segera setelah menjabat pada akhir 2019, Eric mengungkapkan ada 159 kasus hukum yang tertunda di departemennya, dengan 53 orang ditetapkan sebagai tersangka (CNN Indonesia, 2021). BRI Dolopo - Cabang Madiun menjadi salah satu lokasi kejadian tersebut. BRI cabang Dolopo-Madiun merugi Rp 2,1 miliar akibat pembobolan 11 dana nasabah oleh pegawai berinisial RS. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Madiun Bayu Novrian

Dinata menyatakan para tersangka memalsukan buku rekening untuk mencuri dari kliennya (Kompas, 2020). Uang dari sumber ini digunakan untuk taruhan bola online dan pengeluaran pribadi lainnya. Baru setelah dua pelanggan menyadari bahwa tabungan mereka telah hilang, tindakan RS terungkap. Sebelas kreditur teridentifikasi sebagai calon korban RS setelah dilakukan audit internal. Kasus lainnya adalah Yoan Putra, mantan pegawai salah satu cabang bank BUMN Otoritas Kredit Kabanjahe (ADK), ditangkap pada 25 Mei tahun itu, 2021. Dia adalah tersangka kasus korupsi senilai Rp 10 miliar (Merdeka, 2021).

Kasus – kasus tersebut menunjukkan bagaimana pegawai BUMN dapat melakukan korupsi dengan mudah dan merugikan negara dengan angka yang besar. Lantas, perlu dipertanyakan bagaimanakah peran auditor internal dalam mencegah korupsi, sebab korupsi seakan sudah menjadi wabah di kalangan pegawai BUMN. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP), yang di dalamnya terdapat auditor internal, memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor publik. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, Irjen, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Auditor internal biasanya adalah individu yang paling bertanggung jawab langsung untuk mengawasi operasi manajemen sehari-hari (Prawitt et al., 2009).

Auditor internal menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan, termasuk audit terhadap proses dan catatan keuangan (Prawitt *et al.*, 2009). Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen dalam memerangi, menemukan, dan menyelidiki *fraud* dalam suatu organisasi (Gamar & Djamhuri, 2015). Auditor internal bertanggung jawab untuk melakukan audit dalam suatu organisasi dan melaporkan setiap temuan kecurangan atau penyimpangan lainnya kepada pihak yang berwenang untuk temuan lebih lanjut (Sanjaya, 2017). Auditor internal harus terus mengawasi semua proses bisnis selama periode pelaporan untuk menemukan dan melaporkan setiap penyimpangan sesegera mungkin (Anzelya & Kurniawati, 2020).

Selain auditor internal, bagian yang tidak kalah penting dalam mencegah korupsi adalah komite audit. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukungnya dalam menjalankan tugas dan tugasnya, khususnya peran pengawasannya. Komite audit bertugas memastikan kepatuhan terhadap semua prinsip akuntansi, pengendalian internal, kerangka pelaporan eksternal, dan kewajiban hukum (Anzelya & Kurniawati, 2020). Komite Audit hanya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas, namun menjalankan tugasnya secara independen dan menyampaikan laporannya sendiri. Komite audit bertanggung jawab untuk menilai efektivitas pekerjaan auditor internal. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada pelaporan yang tidak jelas atau hasil yang miring.

Permasalahan korupsi telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, utamanya yang berkaitan dengan peran auditor internal dan komite audit dalam menurunkan korupsi. Shohihah dkk. (2018) melakukan penelitian di Kementerian Agama, ia menemukan bahwa efektivitas internal audit dapat menurunkan korupsi. Semakin efektif penerapan internal audit, maka semakin menurunkan korupsi. Setyawan dkk. (2019) yang melakukan penelitian di Kementerian Perhubungan menemukan bahwa internal audit berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Semakin efektif penerapan internal audit, maka semakin meningkatkan pencegahan korupsi. Kualitas audit internal (diwakili oleh independensi, kompetensi, dan integritas auditor internal) memiliki dampak signifikan terhadap korupsi dan membantu memerangi korupsi di sektor publik, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibrinke (2019) pada organisasi di sektor publik Nigeria. Penelitian Asiedu & Deffor (2020) pada organisasi sektor publik di Ghana menemukan bahwa efektivitas fungsi audit internal dipengaruhi secara negatif oleh korupsi sebanding dengan ukuran dan independensi departemen audit internal. Menggunakan data dari analisis 328 perusahaan besar Amerika, Gorshunov et al. (2021) menemukan bahwa kehadiran *quad-qualified* komite audit secara signifikan menurunkan kemungkinan korupsi keuangan dalam bisnis tersebut sebesar 72%.

Auditor internal dan komite audit merupakan garda terdepan dalam BUMN untuk mencegah terjadinya korupsi. Auditor internal dan komite audit yang berkualitas diperlukan untuk menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya korupsi. Semakin tinggi kualitas auditor internal dan komite audit di BUMN, maka seharusnya mampu menurunkan korupsi yang terjadi di BUMN.

Di sebagian besar organisasi, audit internal dipandang sebagai tim profesional terlatih yang siap menawarkan layanan audit menggunakan infrastruktur yang tersedia (Rustendi, 2017). Akibatnya, kaliber auditor internal sangat penting untuk pencapaian tujuan fungsi itu. Semakin berkualitas auditor internal, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendeteksi kecurangan, sehingga manajemen memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan kecurangan, khususnya korupsi. *Statement on Auditing Standards* (SAS) Nomor 65 mendefinisikan kualitas auditor internal sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kompetensi dan objektivitas auditor internal (AICPA, 1997; Prawitt *et al.*, 2009).

Peran penting komite audit juga diperlukan dalam melengkapi fungsi auditor internal dalam mencegah korupsi. Namun, efisiensi kerja komite audit untuk membatasi korupsi lebih penting daripada keberadaan komite audit itu sendiri. Kualitas laba dapat ditingkatkan dengan bantuan komite audit yang efektif dengan melakukan hal-hal seperti meninjau laporan keuangan, menyetujui kebijakan akuntansi, dan mengomentari serta menyetujui kebijakan tersebut (Hassan, 2013).

Efisiensi pemantauan dan efisiensi komite audit berkurang jika keanggotaannya terlalu kecil. Semakin besar komite audit, semakin banyak perhatian pada pembukuan yang dapat membantu mengurangi praktik korupsi (Vafeas, 2005). Rapat dewan yang lebih sering telah terbukti meningkatkan efisiensi oleh Conger *et al.* (1998). Dengan pertemuan yang lebih sering, komite audit dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Komite audit independen dapat melakukan pemantauan manajemen yang lebih menyeluruh, oleh karena itu independensi adalah kualitas utama yang berkontribusi pada efektivitas fungsi pengawasan (Alzoubi & Selamat, 2012). Selain itu, Alzoubi dan Selamat (2012) mencatat bahwa efisiensi komite audit meningkat ketika anggotanya memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi. Efektivitas komite audit dianggap meningkat seiring dengan menurunnya korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, dimana skor CPI Indonesia tahun 2020 turun 3 skor daripada tahun sebelumnya yang menunjukkan persepsi Indonesia semakin korup, banyaknya kasus korupsi di pusaran BUMN, serta melihat bagaimana pentingnya peran auditor internal dan komite audit sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti mengenai peran auditor internal dan komite audit dalam mencegah korupsi di BUMN. Penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi di BUMN”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kualitas auditor internal dan efisiensi komite audit.

Studi ini berbeda dalam beberapa hal penting dari studi serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, sejumlah penelitian sebelumnya memanfaatkan metode studi kasus pada suatu instansi tertentu, seperti penelitian Rajagukguk (2017) yang melakukan studi kasus di PT. Perkebunan Nusantara IV dan Setyawan *dkk.* (2019) yang melakukan studi kasus di kantor pusat Kementerian Perhubungan. Sedangkan, penelitian ini akan meneliti perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih mencerminkan keadaan BUMN di Indonesia. Kedua, kompetensi dan objektivitas auditor internal berfungsi sebagai proxy bagi auditor internal. Sedangkan efisiensi komite audit dapat diperkirakan dari variabel seperti ukuran, frekuensi pertemuan, independensi, dan tingkat keahlian. Laporan tahunan akan berfungsi sebagai dasar untuk semua data pengukuran variabel-variabel ini. Ketiga, penelitian ini mengukur korupsi berdasarkan nilai kerugian keuangan negara pada perusahaan BUMN yang data-datanya diperoleh dari KPK.

## STUDI LITERATUR

### Teori Agensi

Menurut teori keagenan, masalah keagenan muncul ketika pihak-pihak dalam suatu perusahaan mengejar tujuan yang saling bertentangan (tujuan konflik). Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai pemikir yang rasional; akibatnya, mereka hanya memperhatikan kepentingan terbaik mereka sendiri (*self-interest*), yang membuat mereka berhati-hati dalam mengambil risiko yang dapat membahayakan kepentingan tersebut. Korupsi pada sektor BUMN

dapat dijelaskan dengan pendekatan teori agensi. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan BUMN menimbulkan konflik agensi antara prinsipal (negara) dan agen (pegawai BUMN). Pegawai BUMN yang diberikan wewenang untuk mengelola BUMN terkadang memiliki perbedaan kepentingan dengan prinsipal, bahkan seringkali menyimpang dari kepentingan prinsipal. Ketika seorang individu berperilaku dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri (agen) dengan mengorbankan negara (prinsipal), korupsi terjadi (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017).

### **Teori Fraud Triangle**

Upaya pertama untuk menjelaskan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap perilaku *fraud* adalah teori *fraud triangle*. Teori ini menyimpulkan tiga motivasi seseorang melakukan kecurangan. Pertama, *pressure*, kebutuhan finansial para pelaku tindak *fraud* sangat mendesak dan harus tetap dirahasiakan. Kedua, *opportunity*, yaitu pelaku *fraud* melihat kesempatan untuk melakukan tindakan penipuan. Ketiga, *rationalization*, mereka yang melakukan *fraud* mencari cara untuk merasionalisasikannya dalam kerangka etika yang diterima (Priantara, 2013: 44).

### **Teori GONE**

Teori GONE (1993) yang dikembangkan oleh Jack Bologne berfungsi sebagai landasan teori untuk penelitian ini tentang penyebab perilaku *fraud*. Teori GONE adalah penyempurnaan dari *Fraud Triangle Theory*, yang digunakan untuk lebih memahami mengapa orang korup terlibat dalam kegiatan *fraud*. Teori GONE mengusulkan bahwa faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap prevalensi penipuan: *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), *Greed* (keserakahan), dan *Exposes* (hukuman yang rendah) (Isgiyata et al., 2018). Tuanakotta (2010) menegaskan bahwa variabel individu yang terkait dengan pelaku penipuan meliputi *greed* dan *need*. Namun, *opportunity* dan *exposes* adalah kategori informasi yang lebih besar yang mungkin dapat diterapkan pada perusahaan mana pun yang telah menjadi korban penipuan.

### **Korupsi**

Korupsi mengacu pada praktik *fraud* yang menyalahgunakan posisi kepercayaan seseorang untuk melanggar aturan dan peraturan demi keuntungan pribadinya sendiri (Rustendi, 2017). Menurut Umar yang dikutip dalam (Setyawan et al., 2019), perilaku koruptif dari pihak yang berwenang adalah melanggar kepercayaan dari orang yang memberi mereka wewenang tersebut. Korupsi, dalam pengertian hukum, adalah tindakan *fraud*, dan karenanya merupakan pelanggaran yang dapat dihukum (Rustendi, 2017).

### **Kualitas Auditor Internal**

Auditor internal harus mengawasi semua operasi perusahaan selama periode pelaporan untuk menemukan dan melaporkan setiap penyimpangan sesegera mungkin (Anzelya & Kurniawati, 2020). Bahkan jika korupsi tidak sepenuhnya diberantas, korupsi dapat dikurangi secara signifikan jika auditor internal dapat melakukan audit secara menyeluruh. Kualitas audit diukur dengan seberapa dekat ia mematuhi standar audit dan kontrol kualitas yang ditetapkan, serta dalam pelaksanaan tugasnya memenuhi tanggung jawab profesinya (Susilawati, 2018).

### **Efektivitas Komite Audit**

Kualitas laba dapat ditingkatkan dengan bantuan komite audit yang efektif dengan melakukan hal-hal seperti meninjau laporan keuangan, menyetujui kebijakan akuntansi, dan mengomentari serta menyetujui kebijakan tersebut (Hassan, 2013). Komite audit yang efektif diharapkan mampu mencegah manajemen dalam melakukan tindak kecurangan, khususnya korupsi. Seberapa baik efektivitas komite audit dapat diukur dengan melihat karakteristiknya (Nuresa & Hadiprajitno, 2013). Ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, dan kompetensi merupakan karakteristik penting dari komite audit yang efektif (Amin et al., 2018; Kharashgah et al., 2019; Nuresa & Hadiprajitno, 2013; Saleem et al., 2012; Saleem et al., 2016; Vajriyanti dkk., 2016).

## HIPOTESIS

### Pengaruh Kualitas Auditor Internal terhadap Korupsi

Penelitian ini menggunakan pengukuran Prawitt *et al.* (2009) yang mengadopsi SAS Nomor 65 untuk mengukur kualitas auditor internal. Kompetensi dan objektivitas adalah dua kualitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi audit internal. Sementara itu, pengalaman, sertifikasi, dan pelatihan auditor internal dapat menjadi proksi kompetensi aktual mereka. Auditor internal membutuhkan banyak pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan lainnya untuk melaksanakan tugasnya. Semakin kompeten auditor internal, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan, sehingga manajemen memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan kecurangan, khususnya korupsi. Kompetensi auditor internal dapat dimiliki melalui pengalaman, sertifikasi, dan pelatihan yang dimiliki auditor internal (Prawitt *et al.* 2009).

Kemampuan untuk melihat suatu situasi tanpa bias atau prasangka adalah inti dari objektivitas (IIA, 2016). Ada risiko kegagalan yang timbul dari konflik kepentingan, yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap auditor internal, proses audit internal, dan seluruh industri. Kemampuan untuk melaksanakan tugas secara objektif dapat dikompromikan ketika seseorang memiliki konflik kepentingan. Semakin objektif auditor internal, semakin besar kemungkinan untuk melaporkan bukti kecurangan yang ditemukan, sehingga mampu menurunkan korupsi.

Shohihah dkk. (2018) melakukan penelitian di Kementerian Agama menemukan bahwa efektivitas internal audit (yang diproksikan dengan hubungan auditor internal dan eksternal, independensi, kompetensi, serta dukungan manajemen) cenderung dapat menurunkan korupsi. Semakin efektif penerapan internal audit, maka semakin menurunkan korupsi. Kualitas audit internal (diwakili oleh independensi, kompetensi, dan integritas auditor internal) berdampak signifikan terhadap korupsi dan dapat membantu pemberantasan korupsi di sektor publik, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibironke (2019) pada organisasi di sektor publik Nigeria. Mempelajari organisasi sektor publik di Ghana, Asiedu & Deffor (2020) menemukan bahwa ukuran dan independensi departemen audit internal proksi dari audit internal yang efektif berkorelasi signifikan dengan efektivitas fungsi audit internal dan berkorelasi negatif dengan pengaruh korupsi.

Hipotesis penelitian berikut disajikan, yang didasarkan pada teori dan temuan penelitian sebelumnya:

- H1.1: Pengalaman auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi
- H1.2: Sertifikasi auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi
- H1.3: Pelatihan auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi
- H1.4: Objektivitas auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi

### Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi

Komite audit yang efektif dapat meningkatkan ketergantungan, integritas, dan objektivitas laporan keuangan dengan melindungi reputasi perusahaan dan kepentingan pemegang sahamnya (Carcello *et al.*, 2002). Komite audit yang efektif harus dapat menghentikan manajemen terlibat dalam penipuan, khususnya korupsi. Salah satu karakteristik utama yang mempengaruhi efisiensi komite audit adalah ukurannya (Saleem *et al.*, 2012). Jika komite audit terlalu kecil, mereka akan kurang mampu memenuhi tugasnya secara efektif dan efisien (Vafeas, 2005). Diharapkan dengan komite audit yang lebih besar, korupsi dapat dikurangi melalui peningkatan pengawasan.

Rapat dewan yang lebih sering telah terbukti meningkatkan efektivitas menurut Conger *et al.* (1998). Memiliki dewan yang lebih terlibat meningkatkan kemungkinan dewan bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan (Saleem *et al.*, 2012). Semakin sering diadakan rapat komite audit maka pengawasan akan semakin efektif, sehingga korupsi akan semakin rendah.

Meskipun individu independen lebih cenderung tidak memihak dan objektif saat menangani masalah, tujuan komite audit independen adalah untuk menjaga kualitas ini dalam laporan dan rekomendasi komite audit yang disiapkan (FCGI, 2002). Komite audit yang independen diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari kepentingan pihak lain,

sehingga komite audit dapat melaporkan setiap bentuk kecurangan yang ditemukan, khususnya korupsi.

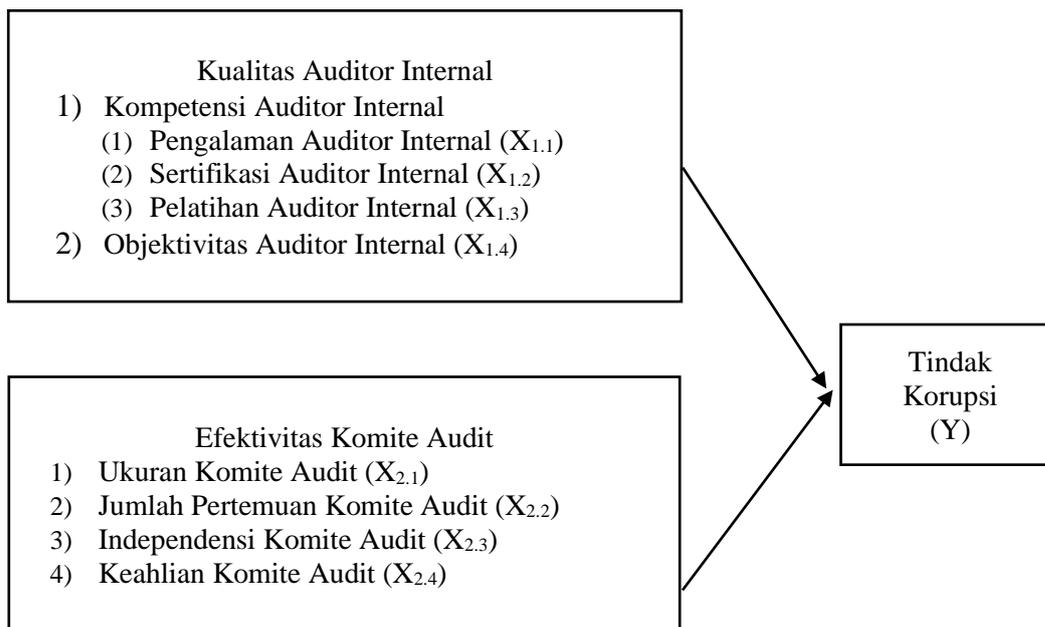
Anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan dan akuntansi yang luas. Komite Audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan secara akurat mencerminkan keadaan keuangan perusahaan. Menurut Saleem et al., menambahkan anggota dengan pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi dapat meningkatkan efektivitas komite audit (2012). Keahlian di pihak komite audit sangat penting untuk memerangi korupsi.

Gorshunov *et al.* (2021) melaksanakan penelitian pada 328 perusahaan besar di Amerika Serikat, ia menemukan bahwasanya keberadaan *quad-qualified* komite audit (yang diprosikan dengan independensi, pengalaman *directorship* dan keahlian keuangan, *bandwidth*, serta kepemilikan saham komite audit) mengurangi kemungkinan korupsi keuangan di perusahaan sebesar 72%. Keberadaan komite audit dapat menurunkan korupsi yang terjadi di perusahaan.

Hipotesis penelitian berikut telah dikembangkan berdasarkan literatur dan pertimbangan teoretis yang ada:

- H2.1: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi
- H2.2: Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi
- H2.3: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi
- H2.4: Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kerangka pemikiran berikut menggambarkan desain penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran  
Sumber: Data yang Sudah Diolah Oleh Penulis (2022)

## METODE

Objek penelitian ini yaitu kualitas auditor internal, efektivitas komite audit, dan tindak korupsi di BUMN. Kompetensi auditor internal (diperoleh melalui pengalaman, sertifikasi, dan pelatihan auditor internal) dan objektivitas auditor internal membentuk kualitas auditor internal. Ukuran komite audit, keteraturan pertemuannya, independensi anggotanya, dan tingkat keahlian mereka semuanya berperan dalam mengukur efektivitas komite audit secara keseluruhan. Penelitian ini bersifat kuantitatif, artinya memanfaatkan data numerik dan menerapkan analisis statistik pada data tersebut untuk analisisnya. *Hypothesis testing* menggambarkan penelitian ini, yang melihat ke dalam hubungan antara variabel yang berbeda.

Untuk penelitian ini, tipe data sekunder digunakan. Laporan tahunan masing-masing perusahaan BUMN dan website Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan untuk menyusun penelitian ini, beserta informasi korupsi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk memahami topik ini, kami memilih untuk melakukan studi dokumen untuk pengumpulan data. Data panel, juga dikenal sebagai *pooled data*, adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan informasi dari sejumlah besar bisnis selama periode waktu tertentu.

Perusahaan BUMN yang diperdagangkan di BEI antara tahun 2016 sampai 2020 merupakan populasi penelitian. Dua puluh BUMN *go public* dan tercatat di BEI. Dalam penelitian ini kami memanfaatkan pendekatan *non-probability sampling*, yakni metode *purposive sampling*. Seluruh populasi penelitian dianggap sebagai sampel karena memenuhi semua persyaratan pengambilan sampel penelitian. Dua puluh perusahaan menjadi sampel untuk penelitian ini, dengan total 100 pengamatan dikumpulkan selama jangka waktu lima tahun. Analisis data dilakukan pada model regresi penelitian. SPSS 26 digunakan untuk melakukan berbagai analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan, termasuk statistik deskriptif, uji hipotesis klasik, dan regresi.

## HASIL

### Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 menyajikan hasil statistik deskriptif masing-masing variabel.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Deviasi Standar
KR	100	0,00	12,00	1,53	3,68
PAI	100	1,00	7,00	2,54	1,55
SAI	100	1,00	6,00	1,45	0,94
LAI	100	1,00	66,00	13,55	11,79
OAI	100	1,00	1,00	1,00	0,00
UKA	100	1,00	14,00	4,74	1,98
PKA	100	4,00	73,00	23,34	12,68
IKA	100	1,00	1,00	1,00	0,00
KKA	100	0,00	1,00	0,43	0,21

Sumber: Data diolah, 2022

Bersumber dari statistik deskriptif, kita dapat menyimpulkan bahwasanya rerata biaya korupsi adalah 1,53 rupiah per orang per tahun. Korupsi merugikan negara rata-rata Rp 1,53 per BUMN, terbukti berdampak negatif terhadap anggaran. Korupsi memiliki nilai maksimal Rp12 dan nilai minimal Rp0, dengan standar deviasi Rp3,68. Kerugian keuangan negara terbesar ditopang oleh PT Bank Mandiri Tbk akibat korupsi pada 2018. Terdapat skor rerata 2,54 pada uji statistik deskriptif berdasarkan pengetahuan auditor internal. Hal ini memperlihatkan bahwasanya rerata kepala auditor internal memiliki pengalaman 2,54 tahun di bidangnya. Pengalaman auditor internal memiliki angka maksimal senilai 7, angka minimum sejumlah 1, dan deviasi standarnya 1,55. Kepala auditor internal PT Gas Negara Tbk memiliki pengalaman yang paling lama sebagai auditor internal, yakni 7 tahun.

Sertifikasi auditor memiliki rerata 1,45. Data ini mengindikasikan bahwasanya terdapat rata-rata 1,45 sertifikasi auditor yang dipegang oleh kepala auditor internal. Skor maksimum sertifikasi auditor internal adalah 6, skor minimum adalah 1, dan standar deviasi 0,94. Kepala auditor internal PT Semen Baturaja Tbk memiliki sertifikasi yang paling banyak dalam bidang audit, yakni 6 sertifikasi. Selanjutnya, pelatihan auditor internal diketahui mempunyai rerata senilai 13,55. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya secara rerata auditor internal telah mengikuti pelatihan audit sebanyak 14 kali pelatihan. Pelatihan auditor internal mempunyai angka maksimum senilai 66, skor minimum sebanyak 1, dan deviasi standarnya 11,79. Auditor internal PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2018 telah mengikuti pelatihan audit terbesar, yakni sebanyak 66 kali pelatihan.

Pada ukuran komite audit mempunyai rerata senilai 4,74, yang mengindikasikan bahwasanya secara rerata komite audit beranggotakan 5 orang. Ukuran komite audit mempunyai skor

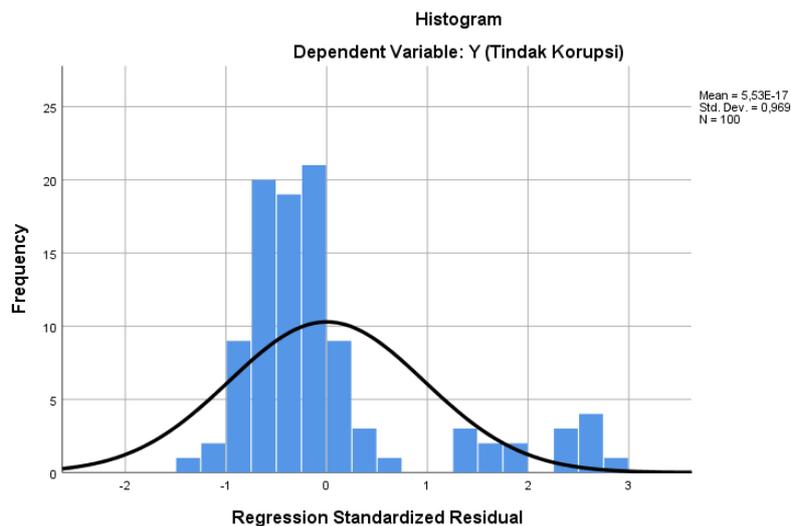
maksimum 14, angka minimum senilai 1, dengan deviasi standarnya 1,98. Komite audit PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2020 memiliki anggota komite audit terbesar, yakni sebanyak 14 orang. Sedangkan rerata jumlah pertemuan komite audit adalah 23,34 kali. Perihal ini memperlihatkan bahwa komite audit rerata mengadakan pertemuan sebanyak 23 kali. Rapat komite audit terbanyak ialah 73, terendah adalah 4, dan standar deviasi adalah 12,68. PT Krakatau Steel Tbk pada tahun 2020 melaksanakan pertemuan dengan jumlah tertinggi, yakni 73 kali pertemuan. Keahlian komite audit menunjukkan angka rerata senilai 0,43. Oleh karena itu, hanya 43% anggota komite audit yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, atau audit. Keahlian komite audit mempunyai angka maksimal 1 atau 100%, angka minimum 0, dengan standar deviasi 0,21. Seluruh anggota komite audit PT Indofarma Tbk pada tahun 2016 memiliki keahlian dalam akuntansi, keuangan dan audit.

Objektivitas auditor internal dan independensi komite audit menunjukkan angka rata-rata, nilai terbesar dan nilai terkecil sebesar 1, sedangkan deviasi standar sebesar 0. Objektivitas auditor internal dan independensi komite audit pada semua perusahaan sampel di semua tahun memiliki nilai yang konstan, yakni 1. Hal ini berarti bahwa, semua kepala auditor internal melaporkan laporan auditnya kepada komite audit, bukan kepada manajemen serta semua anggota komite audit berasal dari luar perusahaan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa auditor internal semua perusahaan sampel pada semua tahun telah objektif, begitu pula dengan anggota komite audit semua perusahaan sampel pada semua tahun telah independen. Berdasarkan nilai yang konstan tersebut, maka variabel objektivitas auditor internal dan independensi komite audit dikeluarkan dari pengujian hipotesis.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Kurva histogram digunakan dalam rangka memeriksa normalitas. Jika lebar sisi kiri dan kanan kurva histogram sama, residual dalam model regresi terdistribusi secara teratur. Pengujian normalitas menunjukkan bahwa histogram model penelitian simetris pada ekstremitas kiri dan kanannya. Sebagian besar data berada dalam rentang rata-rata yang relatif sempit. Itu sebabnya kita dapat mengatakan nilai residual model regresi normal terdistribusi secara normal. Gambar 2 terlihat hasil pengujian normalitas yang dilakukan pada model regresi.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas  
Sumber: Data diolah, 2022

#### Uji Multikolinieritas

Untuk menguji multikolinieritas digunakan pendekatan *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinieritas tidak terjadi bila VIF bernilai kurang dari 10. Dalam dua model regresi, multikolinieritas diselidiki. Tabel 3 menunjukkan bahwa  $VIF < 10$  dan toleransi  $> 0,10$  benar untuk semua variabel independen. Akibatnya, tidak terdapat indikasi multikolinieritas pada model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengalaman auditor internal	0,915	1,093	Tidak ada multikolinieritas
Sertifikasi auditor internal	0,906	1,103	Tidak ada multikolinieritas
Pelatihan auditor internal	0,782	1,279	Tidak ada multikolinieritas
Ukuran komite audit	0,784	1,275	Tidak ada multikolinieritas
Jumlah pertemuan komite audit	0,953	1,050	Tidak ada multikolinieritas
Keahlian komite audit	0,815	1,227	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2022

### Uji Autokorelasi

Untuk menguji autokorelasi, uji Durbin-Watson dilakukan. Ketika  $du < dw < (4-du)$  ada, autokorelasi tidak ada. Tabel 4 menampilkan hasil pengujian autokorelasi yang menunjukkan bahwa model regresi tidak memperlihatkan adanya autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel Dependen	Du	Dw	4-du	Keterangan
Korupsi	1,803	1,934	2,107	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2022

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Glejser dilakukan dalam rangka menguji heteroskedastisitas. Regresi variabel independen pada nilai absolut dari residu merupakan uji Glejser. Untuk menjadi homoskedastis, atau tidak adanya gejala heteroskedastis, nilai tanda harus melebihi 0,05. Hasil pengujian heteroskedastisitas terlihat dalam Tabel 5; nilai sig pengaruh variabel independen terhadap nilai absolut variabel residual signifikan secara statistik dan melebihi alpha (0,05). Karena model regresi tak menunjukkan bukti heteroskedastisitas, maka asumsi homoskedastisitas berlaku.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T-hitung	P-value	Keterangan
Pengalaman auditor internal	2,649	0,009	Tidak signifikan
Sertifikasi auditor internal	-1,724	0,100	Tidak signifikan
Pelatihan auditor internal	1,378	0,219	Tidak signifikan
Ukuran komite audit	1,101	0,274	Tidak signifikan
Jumlah pertemuan komite audit	1,110	0,068	Tidak signifikan
Keahlian komite audit	-1,800	0,075	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah, 2022

### Analisis Regresi Berganda

Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk menilai signifikansi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh pengalaman auditor internal (PAI), sertifikasi auditor internal (SAI), pelatihan auditor internal (LAI), ukuran komite audit (UKA), jumlah pertemuan komite audit (PKA), dan keahlian komite audit (KKA) terhadap korupsi (KR).

#### Uji Model (Uji F)

Kami melakukan uji model, kadang-kadang disebut uji F, pada model regresi untuk menyelidiki dampak keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji-F ditampilkan di Tabel 6; F-hitung ialah 2,50, dan *p-value* adalah 0,027. Variabel pengalaman auditor internal (PAI), sertifikasi auditor internal (SAI), pelatihan auditor internal (LAI), ukuran komite audit (UKA), jumlah pertemuan komite audit (PKA), dan keahlian komite audit (KKA) mempengaruhi secara signifikan terhadap korupsi (KR), terbukti dari *p-value* lebih rendah dari  $\alpha$  ( $0,027 < 0,050$ ).

Tabel 6. Hasil Uji Model (Uji F)

F-hitung	p-value F	Keterangan
2,500	0,027	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2022

### Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengevaluasi hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pada model regresi ditampilkan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	T	Sig.	Keterangan
Konstanta	2,597	1,418	0,160	
Pengalaman auditor internal	-0,503	-2,115	0,037	Signifikan (-)
Sertifikasi auditor internal	-0,444	-1,129	0,262	Tidak Signifikan
Pelatihan auditor internal	-0,012	-0,354	0,724	Tidak Signifikan
Ukuran komite audit	-0,289	-1,434	0,155	Tidak Signifikan
Jumlah pertemuan komite audit	-0,032	-1,116	0,267	Tidak Signifikan
Keahlian komite audit	-2,830	-1,516	0,133	Tidak Signifikan

*R square* (0,139)

Sumber: Data diolah, 2022

*R-Square* yang diperoleh dari perhitungan koefisien determinasi senilai 0,139. Maknanya bahwasanya, penjelasan variabel korupsi (KR) sebesar 13,9% meliputi pengalaman auditor internal (PAI), sertifikasi auditor internal (SAI), pelatihan auditor internal (LAI), ukuran komite audit (UKA), frekuensi pertemuan komite audit (PKA), dan audit Komite Keahlian (KKA). Sedangkan variabel yang tidak dimasukkan dalam analisis ini menyumbang sisa 86,1% dari varians. Berikut persamaan regresi berdasarkan Tabel 7:

$$KR = 2,597 - 0,503PAI - 0,444SAI - 0,012LAI - 0,289UKA - 0,032PKA - 2,830KKA + \epsilon_t \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- KR = Korupsi
- PAI = Pengalaman Auditor Internal
- SAI = Sertifikasi Auditor Internal
- LAI = Pelatihan Auditor Internal
- UKA = Ukuran Komite Audit
- PKA = Jumlah Pertemuan Komite Audit
- KKA = Keahlian Komite Audit
- $\epsilon_t$  = Error Term

Dengan koefisien regresi -0,503 dan probabilitas senilai -0,037, pengalaman auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi. H1.1 diterima dikarenakan probabilitas lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan alpha (0,05), maknanya pengalaman auditor internal mempunyai pengaruh negatif terhadap korupsi. Sedangkan probabilitas hubungan sertifikasi auditor internal dengan korupsi bernilai 0,262 dan koefisien regresi senilai -0,444. Memiliki arah negatif dan nilai probabilitas lebih tinggi dari alpha (0,05) menyebabkan penolakan terhadap H1.2, yang bermakna korupsi tidak terpengaruh oleh sertifikasi auditor internal.

Pelatihan auditor internal berhubungan negatif dengan korupsi, dengan koefisien regresinya -0,012 dan probabilitas senilai 0,724. Probabilitas melebihi taraf signifikansi (alpha = 0.05), alhasil hipotesis H1.3 ditolak; ini mengindikasikan bahwasanya pelatihan auditor internal tak mempengaruhi korupsi. Berikutnya, pengaruh ukuran komite audit terhadap korupsi adalah negatif karena koefisien regresi senilai -0,289 dengan probabilitasnya yakni 0,155. H2.1 ditolak ketika probabilitas hasil negatif melebihi tingkat signifikansi (alpha = 0,05). Sederhananya, tidak ada korelasi antara ukuran komite audit dan kejadian korupsi.

Terdapat hubungan negatif antara rapat komite audit dengan korupsi, dengan koefisien regresi senilai  $-0,032$  dengan probabilitasnya  $-0,267$ . H2.2 ditolak karena probabilitas ternyata salah lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan oleh asumsi pengujian hipotesis alpha ( $0,05$ ). Akibatnya, tidak ada hubungan antara penurunan korupsi dan frekuensi rapat komite audit. Selain itu, korupsi dipengaruhi secara negatif oleh keterampilan komite audit, dengan koefisien regresi  $-2,830$  dengan probabilitas  $-0,133$ . H2.4 ditolak karena arahnya negatif, tetapi probabilitasnya melebihi tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Korupsi tidak terpengaruh oleh keahlian komite audit.

## PEMBAHASAN

### Substansi Proposisi Hipotesis 1

Hipotesis pertama menguji apakah kompetensi dan objektivitas auditor internal memiliki pengaruh terhadap kejadian korupsi di suatu organisasi. Kompetensi auditor internal diprosikan dengan pengalaman, sertifikasi, dan pelatihan auditor internal. Variabel objektivitas auditor internal dikeluarkan dari pengujian hipotesis, karena memiliki nilai yang konstan pada semua perusahaan sampel di semua tahun pengamatan.

#### **Pengaruh Pengalaman Auditor Internal terhadap Korupsi (H<sub>1.1</sub>)**

Tugas auditor internal antara lain melakukan audit dalam suatu organisasi dan melaporkan setiap temuan kecurangan atau penyimpangan lainnya kepada otoritas yang berwenang untuk temuan lebih lanjut (Sanjaya, 2017). Auditor internal harus terus mengawasi semua proses bisnis selama periode pelaporan untuk menemukan dan melaporkan setiap penyimpangan sesegera mungkin (Anzelya & Kurniawati, 2020). Pengalaman auditor internal dapat dilihat dari seberapa lama (jumlah tahun) seseorang menjabat sebagai auditor internal. Semakin lama pengalaman auditor internal dalam bidang audit, maka kompetensi auditor internal akan meningkat dan semakin meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi korupsi, sehingga dapat menurunkan korupsi.

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji hipotesis untuk H<sub>1.1</sub>, pengalaman auditor internal berbanding terbalik dengan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi menurun seiring bertambahnya tahun-tahun yang dihabiskan sebagai auditor internal. Auditor internal yang berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik tentang subjek di bawah pengawasan karena mereka cenderung melakukan lebih banyak tugas pemeriksaan selama karir mereka (Ningtyas et al., 2018). Ketika seorang auditor memiliki lebih banyak pengalaman, kecurangan lebih mungkin ditangkap karena mereka akan tahu bagaimana menangani situasi yang tidak biasa. Sebaliknya, saat seorang auditor memiliki pengalaman yang terbatas, akibatnya kualitas deteksi kecurangan yang dihasilkan akan menurun (Ningtyas et al., 2018). Ini berarti bahwa auditor yang lebih berpengalaman dapat mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan dengan lebih baik daripada rekan mereka yang kurang berpengalaman.

Korupsi merugikan uang negara, dan jika auditor internal bisa menangkap kecurangan, angka itu bisa turun. Konsisten dengan temuan Trisna dan Aryanto (2016), serta Ningtyas dkk. (2018) yang menemukan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Iftinan dan Sukarmanto (2022) juga menemukan bahwa pengalaman auditor mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan, oleh karena itu lebih banyak pengalaman berarti kemampuan mendeteksi lebih besar. Kemampuan mendeteksi kecurangan yang lebih besar akan menurunkan tingkat korupsi yang dilakukan perusahaan.

#### **Pengaruh Sertifikasi Auditor Internal terhadap Korupsi (H<sub>1.2</sub>)**

H<sub>1.2</sub> diuji hipotesisnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara sertifikasi auditor internal dengan korupsi. Perihal tersebut mengindikasikan bahwasanya, jumlah sertifikasi yang dimiliki auditor internal tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat korupsi. Sertifikasi yang dimiliki auditor internal menunjukkan kemampuan audit yang mereka miliki. Ada korelasi positif antara jumlah sertifikat audit yang dimiliki seseorang dan kemampuan seseorang untuk memberantas korupsi. Namun, penelitian ini membantah hipotesis bahwa auditor internal bersertifikat cenderung tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Sertifikasi yang dimiliki auditor internal menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi untuk menilai kekuatan pengendalian internal, menentukan potensi penipuan, dan menemukan contoh-contohnya harus ditingkatkan seiring dengan perluasan keahlian seseorang. Kemampuan

tersebut yang pada akhirnya akan menurunkan tindak korupsi yang terjadi di perusahaan. Namun, dalam praktiknya, kompetensi auditor internal tidak memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami efektivitas pengendalian internal, mengevaluasi risiko kecurangan, atau mengidentifikasi kecurangan. Menurut studi oleh Pambudi (2016), tingkat keahlian auditor internal tidak berpengaruh pada kapasitas mereka untuk memahami efektivitas pengendalian internal, menilai kemungkinan kecurangan, atau menemukan aktivitas kecurangan.

Sanusi et al. (2015) berpendapat bahwa kemampuan auditor dalam mengevaluasi risiko kecurangan akan meningkat seiring dengan pengalaman. Latar belakang auditing yang disebutkan di sini tentunya relevan dengan topik fraud. Dalam hal mendeteksi kecurangan, kompetensi auditor internal di perusahaan sampel tidak menjadi masalah karena mereka jarang mengerjakan penugasan terkait kecurangan. Mengetahui cara menemukan kecurangan tidak terkait dengan menjadi auditor internal yang kompeten. Hal ini disebabkan faktor-faktor seperti kecanggihan penipu, frekuensi manipulasi, tingkat kolusi, dan tingkat senioritas juga berperan dalam dapat atau tidaknya mendeteksi penipuan (Knapp dan Knapp, 2001; Popoola et al., 2015; Supriyanto, 2014; Sanusi et al., 2015). Ini masuk akal mengingat kesulitan dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh eksekutif tingkat tinggi dibandingkan dengan anggota staf yang lebih junior. Akibatnya, menemukan aktivitas kecurangan menjadi lebih sulit. Untuk berhasil mencegah, mengidentifikasi, dan menangani penipuan, Popoola et al. (2015) berpendapat bahwa dibutuhkan lebih dari sekadar pemahaman tentang laporan keuangan yang diaudit, standar pelaporan akuntansi, dan teknologi.

### **Pengaruh Pelatihan Auditor Internal terhadap Korupsi (H<sub>1.3</sub>)**

Peningkatan kompetensi auditor internal melalui pemberian pelatihan-pelatihan dapat meningkatkan kualitas audit (Susilawati dan Atmawinata, 2014). Semakin sering pelatihan-pelatihan yang diikuti auditor internal, maka kompetensi auditor internal akan meningkat dan semakin meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi korupsi, sehingga dapat menurunkan korupsi. Hipotesis H<sub>1.3</sub> diuji, dan hasilnya ditemukan bahwasanya pelatihan auditor internal tidak berpengaruh terhadap korupsi. Artinya jumlah pelatihan auditor internal tidak mempengaruhi prevalensi korupsi. Kemampuan yang lebih baik untuk memerangi korupsi dikaitkan dengan peningkatan pelatihan audit. Namun, penelitian ini membantah hipotesis bahwa pelatihan auditor internal mengarah pada berkurangnya korupsi.

Pelatihan yang paling penting agar auditor internal memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan adalah pelatihan mengenai audit kecurangan. Karena sifat khusus pelatihan audit kecurangan, khususnya di bidang teknologi informasi dan audit investigasi, auditor internal tidak menerima pelatihan ekstensif di bidang ini (Afiani et al., 2019). Pelatihan audit kecurangan biasanya diberikan kepada auditor internal yang telah lama menjabat sebagai auditor internal di suatu perusahaan. Sedangkan, secara rerata auditor internal pada perusahaan sampel baru menjabat sebagai auditor internal selama 2,5 tahun. Pelatihan – pelatihan yang diberikan kepada auditor internal baru biasanya berupa dasar – dasar audit dan belum sampai ke audit kecurangan. Oleh karena itu, pelatihan yang dilakukan tidak dapat menurunkan korupsi, sebab pelatihan yang diberikan bukan ilmu utama untuk mendeteksi kecurangan.

## **Substansi Proposisi Hipotesis 2**

Hipotesis kedua mempertimbangkan bagaimana komite audit yang efektif dapat mempengaruhi korupsi. Ukuran efektivitas komite audit meliputi ukuran komite, independensi, frekuensi pertemuan, dan kedalaman pengalaman. Karena nilai variabel independen komite audit adalah sama untuk semua perusahaan sampel di semua tahun pengamatan, maka tidak digunakan dalam rangka menguji hipotesis.

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Korupsi (H<sub>2.1</sub>)**

Temuan pengujian hipotesis H<sub>2.1</sub> menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya korupsi. Ini menyiratkan bahwa memperluas ukuran komite audit tidak membantu menyelesaikan masalah korupsi. Efektivitas komite audit dalam mencegah dan menghukum kesalahan meningkat sebanding dengan jumlah anggotanya. Akan tetapi, studi ini membantah hipotesis bahwasanya komite audit yang lebih besar kurang rentan terhadap korupsi. Kusumaningsih dan Wirajaya (2017) menemukan bahwa ukuran komite audit

tidak mempengaruhi kejadian kecurangan, sehingga temuan kami konsisten dengan temuan mereka.

Peningkatan pengawasan tidak dapat diasumsikan hanya karena ukuran komite audit telah berkembang. Sebab, yang terpenting adalah bagaimana kemampuan masing – masing anggota komite audit tersebut dalam melakukan pengawasan agar korupsi tidak terjadi. Laporan keuangan perusahaan diperiksa oleh Komite Audit untuk memastikan laporan tersebut menggambarkan situasi keuangannya dengan tepat. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bahwa individu dengan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi disertakan dalam komite audit. Alzoubi dan Selamat (2012) mengklaim bahwa komite audit dengan anggota yang memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi lebih berhasil. Dalam survei ini, rata-rata 43% anggota komite audit kurang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Meskipun komite audit biasanya terdiri dari lima orang, hanya 43% dari mereka yang memiliki kredensial keuangan atau akuntansi. Oleh karena itu, komite audit yang terlalu besar tidak berpengaruh terhadap efektivitas komite audit jika kapasitasnya tidak mencukupi. Dengan kata lain, peran komite audit menjadi sia-sia. Berdasarkan hal tersebut, maka ukuran komite audit tidak mempengaruhi korupsi di perusahaan BUMN.

### **Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Korupsi (H<sub>2.2</sub>)**

Frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh yang kecil terhadap seberapa umum korupsi, menurut pengujian hipotesis H<sub>2.2</sub>. Ini menyiratkan bahwa sesi komite audit yang dijadwalkan secara rutin tidak membantu mengurangi korupsi. Lebih banyak pertemuan komite audit berarti lebih banyak kesempatan untuk pengawasan dan pengawasan, yang keduanya berkontribusi pada organisasi yang tidak terlalu korup. Namun, penelitian ini membantah hipotesis bahwa peningkatan frekuensi rapat komite audit akan mengurangi kasus korupsi. Temuan ini konsisten dengan temuan Ruchiatna et al. (2020) bahwasanya frekuensi pertemuan komite audit tidak ada kaitannya dengan kejadian kecurangan.

Komite Audit wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris informasi sebagai berikut sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002: a) temuan audit yang dilakukan oleh kegiatan assessment, Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan Auditor Eksternal untuk mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak tepat; b) rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian manajemen perusahaan dan prosedur audit internalnya. Hasil akhir dari setiap pertemuan yang dilakukan, komite audit memberikan rekomendasi – rekomendasi kepada manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem pengendalian manajemen. Pihak manajemen sudah seharusnya menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan komite audit. Namun, pertemuan komite audit menjadi tidak efektif karena anggotanya gagal menindaklanjuti rekomendasi komite (Ruchiatna et al., 2020). Pamudji (2008) menambahkan bahwa karena manajemen tidak hadir dalam pertemuan komite audit, masalah pelaporan keuangan tidak terselesaikan. Karena itulah tiada hubungan antara peningkatan frekuensi rapat komite audit dan pemberantasan korupsi. Rekomendasi komite audit hanya berguna sejauh mana rekomendasi tersebut diimplementasikan oleh manajemen dan dewan komisaris.

### **Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Korupsi (H<sub>2.4</sub>)**

Hasil uji hipotesis H<sub>2.4</sub> menunjukkan bahwa korupsi tidak dipengaruhi oleh keahlian komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian dan pengetahuan komite audit tidak berguna dalam perang melawan korupsi. Pembentukan komite audit dengan ahli keuangan dan akuntansi yang berkualitas yang memahami industri perusahaan dapat meningkatkan upaya untuk menghindari korupsi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman komite audit tidak terkait dengan korupsi. Kami menemukan hasil yang sejalan dengan Utami et al. (2019), yang menemukan bahwa keahlian komite audit tidak berdampak pada kecurangan.

Alzoubi dan Selamat (2012) menegaskan bahwa memiliki anggota dengan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi meningkatkan efektivitas komite audit. Menurut penelitian, hanya 43% anggota komite audit yang memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi. Jumlah yang dapat dikatakan terlalu kecil untuk bisa menciptakan pengawasan yang efektif. Keahlian yang kurang mumpuni tersebut menyebabkan keberadaan komite audit menjadi tidak efektif dalam menurunkan korupsi.

Komite Audit bertanggung jawab untuk meninjau kinerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau auditor internal dan hasil audit mereka. Pada hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa sertifikasi dan pelatihan auditor internal yang merupakan tolok ukur kompetensi auditor internal tidak mempengaruhi penurunan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal kurang efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya dan menghasilkan hasil yang bermanfaat dari audit yang mereka lakukan. Sehingga, komite audit juga menjadi kurang efektif dalam melakukan penilaian terhadap hasil kerja auditor internal tersebut. Dikarenakan keahlian komite audit kurang mumpuni dalam mengurangi korupsi dan hasil audit auditor internal kurang efektif dalam melakukannya, maka keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap korupsi.

### KESIMPULAN

Ada 6 temuan dalam penelitian ini. Pertama, ada korelasi negatif antara korupsi dan tingkat pengalaman auditor internal. Semakin lama pengalaman auditor internal dalam bidang audit, maka kompetensinya akan meningkat dan semakin meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi korupsi. Kedua, sertifikasi auditor internal tidak berpengaruh terhadap korupsi. Sertifikasi yang dimiliki auditor internal menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Kemampuan mereka untuk mengevaluasi risiko kecurangan, mendeteksi kecurangan, dan memahami efektivitas pengendalian internal tidak terhalang oleh keahlian ini. Ketiga, pelatihan auditor internal tidak berpengaruh terhadap korupsi. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada auditor internal baru biasanya berupa dasar – dasar audit dan belum sampai ke audit kecurangan. Oleh karena itu, pelatihan yang dilakukan tidak dapat menurunkan korupsi, sebab pelatihan yang diberikan bukan ilmu utama untuk mendeteksi kecurangan. Keempat, ukuran komite audit tidak mempengaruhi korupsi. Ukuran komite audit yang besar bukanlah jaminan pengawasan yang dijalankan juga akan meningkat. Sebab, yang terpenting adalah bagaimana kemampuan masing – masing anggota komite audit tersebut dalam melakukan pengawasan agar korupsi tidak terjadi. Kelima, Korupsi tidak berkorelasi dengan frekuensi pertemuan komite audit. Manajemen dan dewan gagal menindaklanjuti rekomendasi komite audit, sehingga pertemuan menjadi tidak efektif. Keenam, keahlian komite audit tidak mempunyai pengaruh pada korupsi. Ini karena keahlian komite audit yang kurang mumpuni dalam menurunkan korupsi, ditambah hasil audit dari auditor internal yang kurang efektif dalam menurunkan korupsi.

### REFERENSI

- Afiani, F.A., Latifah, N., dan Sukanto, E. 2019. Skeptisme Profesional, Pelatihan Audit Kecurangan, Pengalaman Audit dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Inspektorat Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah. *Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional Unimus*, 2, 564-571.
- Amin, A., Lukviarman, N., Suhardjanto, D., & Setiany, E. 2018. Audit Committee Characteristics and Audit Earnings Quality: Empirical Evidence of the Company with Concentrated Ownership. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 18-33.
- Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. 2017. Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector. *International Journal of Auditing*, 21(1), 82-99.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2016. *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. USA: Association of Certified Fraud Examiners.
- Alzoubi, S. & Selamat, M. 2012. The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms on Constraining Earning Management: Literature Review and Proposed Framework. *International Journal of Global Business*, 5(1), 17-35.
- Anzelya, Y. & Kurniawati. 2020. Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Kualitas Internal dan Eksternal Audit terhadap Manajemen Laba Riil. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 99-112.
- American Institute of Certified Public Accountants. 1997. *AICPA Professional Standards: U.S Auditing Standards as of June 1, 1997*. New York: American Institute of Certified Public Accountants.
- Carcello, J., Hermanson, D., Neal, T., & Riley, R. 2002. Board Characteristics and Audit Fees. *Contemporary Accounting Research*, 19(3), 365-284

- CNN Indonesia. 2021. Erick Thohir: Ada 159 Kasus Korupsi di Kementerian BUMN. Melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302105027-92-612537/erick-thohir-ada-159-kasus-korupsi-di-kementerian-bumn>
- Conger, J., Finegold, D. & Lawler, E. 1998. Appraising Boardroom Performance. *Harvard Business Review*, 76(1), 136-148.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta: FCGI.
- Gamar, N. & Djamhuri, A. 2015. Auditor Internal Sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107-123.
- Gorshunov, M., Armenakis, A., Harris, S., & Walker, H. 2021. Quad-Qualified Audit Committee Director: Implications for Monitoring and Reducing Financial Corruption. *Journal of Corporate Finance*, 66, 1-14.
- Hassan, S. 2013. Financial Reporting Quality, Does Monitoring Characteristics Matter? An Empirical Analysis of Nigerian Manufacturing Sector. *The Business & Management Review*. 3(2), 147-161.
- Ibironke, E. 2019. Effect of Internal Audit Quality on Corruption in Nigeria Public Sector. *Amity Journal of Corporate Governance*, 4(1), 1-14.
- Iftinan, S.H. dan Sukarmanto, E. 2022. Pengaruh Pengalaman Auditor dan Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, 2(1), 1-8.
- Indonesian Institute of Audit Committee. 2022. Tentang Komite Audit. Melalui <https://www.ikai.id/tentang-komite-audit/>.
- Isgiyata, T., Indayani, & Budiyoni, E. 2018. Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 31-42.
- Knapp, C.A. dan Knapp, M.C. 2001. The Effects of Experience and Explicit Fraud Risk Assessment in Detecting Fraud with Analytical Procedures. *Accounting, Organizations and Society*, 26, 25-37.
- Kharashgah, K., Amran, N., & Ishak, R. 2019. The Impact of Audit Committee Characteristics on Real Earnings Management: Evidence from Jordan. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4), 84-97.
- Kompas. 2020. Pegawai Bank BUMN Korupsi Rp 2,1 M Untuk Judi Bola Online, Ambil Uang 11 Nasabah Sedikit Demi Sedikit. Melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/09/22/14582961/pegawai-bank-bumn-korupsi-rp-21-m-untuk-judi-bola-online-ambil-uang-11?page=all>
- Kusumaningsih, K.U. dan Wirajaya, I.G.A. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan di Perusahaan Perbankan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 1832-1860.
- Merdeka. 2021. Rugikan Negara Rp 10 Miliar, Mantan Pegawai Bank BUMN Cabang Kabanjahe Ditangkap. Melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/rugikan-negara-rp10-miliar-mantan-pegawai-bri-cabang-kabanjahe-ditangkap.html>
- Ningtyas, I., Delamat, H., dan Yuniartie, E. 2018. Pengaruh Pengalaman, Keahlian, dan Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan). *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 113-124.
- Nuresa, A. & Hadiprajitno, B. 2013. Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Pambudi, T. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Auditor Internal di Perguruan Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Pamudji, S. dan Trihartati, A. 2008. Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 6(1), 38-54.

- Popoola, O.M.J., Ayoib, B.C.A., dan Rose, S.S. 2015. An Empirical Investigation of Fraud Risk Assessment and Knowledge Requirement on Fraud Related Problem Representation in Nigeria. *Accounting Research Journal*, 28(1), 78-97.
- Prawitt, D., Smith, J., & Wood, D. 2009. Internal Audit Quality and Earnings Management. *The Accounting Review*, 84(4), 1255-1280.
- Priantara, D. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayuningtyas, D. & Setyaningrum, D. 2017. Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4),
- Rajagukguk, T. 2017. Pengaruh Internal Audit dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1), 8-21.
- Ruchiatna, G., Midiastuty, P.P., dan Suranta, E. 2020. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Fraudulent Reporting (The Effect of Audit Committee on Fraudulent Financial Reporting). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 1(4), 255-264.
- Rustendi, T. 2017. Peran Audit Internal dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111-126.
- Saleem F., Alifiah, M., & Tahir, M. 2016. The Effectiveness of Monitoring Mechanisms for Constraining Earnings Management: A Literature Survey for a Conceptual Framework. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(S3), 209-214.
- Sanjaya, A. 2017. Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 41-55.
- Sanusi, Z.M., Nurliyana, H.K., dan Amilin, M. 2015. An Evaluation of Client's Fraud Reasoning Motives in Assessing Fraud Risk: From Perspective of External and Internal Auditor. *International Accounting and Business Conference*.
- Setyawan, E., Rustiani, D., Nawazir, N., Marcelina, S., Phang, V., Lumanaw, N., Erikson, & Umar, H. 2019. Pengaruh SPIP dan Efektivitas Internal Audit Terhadap Pencegahan Korupsi dengan Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pusat Kementerian Perhubungan). *Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 Buku 2*, 291-298.
- Shohihah, I., Djamhuri, A., & Purwanti, L. 2018. Determinants of Internal Audit Effectiveness and Implication on Corruption Prevention in The Religious Ministry. *Wacana*, 21(1), 1-14.
- Supriyanto. 2014. Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit, Tipe Kepribadian, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Solo dan Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susilawati & Atmawinata, M. 2014. Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Etikonomi*, 13(2), 190-210.
- Transparency International. 2021. The ABCS of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is Calculated. Melalui <https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated>
- Transparency International Indonesia. 2021. Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 dan Kemunduran Demokrasi. Melalui <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>
- Tuanakotta, T.M. 2010. *Audit Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, L., Handajani, L., dan Hermanto. Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1570-1600.
- Vafeas, N. 2005. Audit Committees, Boards, and the Quality of Reported Earnings. *Contemporary Accounting Research*, 22(4), 1093-1122.
- Vajriyanti, E., Subekti, I., & Ghofar, A. 2016. Pengaruh Mekanisme Komite Audit Terhadap Manajemen Laba: Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Melakukan Manajemen Laba Untuk Menghindari Kerugian. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 801-810.